

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergantian kepemimpinan suatu negara yang terhitung masih belia sering kali menimbulkan peralihan atau pembaruan sistem politik pada pemerintahannya. Salah satunya sistem demokrasi, sebuah sistem yang banyak diterapkan oleh negara-bangsa yang baru merdeka, atau baru melewati masa transisi pemerintahan. Meskipun kerap kali, pergantian itu tak membawa perubahan yang signifikan, bahkan bisa jadi malah memperburuk keadaan negara itu sendiri. Itu pula yang memicu terjadinya kudeta. Dalam sejarahnya, hampir semua negara mengalami proses kudeta, proses itu banyak dilakukan oleh pihak militer dengan dalih mengamankan situasi negara. Tak dipungkiri juga bisa melibatkan warga sipil. Kudeta membutuhkan bantuan intervensi massa atau kekuatan bersenjata yang besar.¹

Proses transisi kekuasaan tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Transisi kekuasaan kerap kali diwarnai dengan pergulatan politik yang sengit. Gejolak yang dialami pada masa transisi kekuasaan Soekarno kepada Soeharto diwarnai dengan adanya situasi krisis politik yang begitu besar sehingga menyebabkan

¹Soebandrio, *kesaksianku tentang G 30 S*, (Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001), hlm. 60-61.

banyak korban yang berjatuh. Hal ini kemudian menyita banyak perhatian media masa, baik lokal maupun internasional.²

Situasi politik di Indonesia menjelang berakhirnya pemerintah Soekarno diwarnai dengan adanya pertentangan-pertentangan berbagai kekuatan politik yang ada waktu itu. Ada tiga kekuatan politik yang menampilkan “Permainan Segitiga” dengan pelaku utama yaitu Soekarno, PKI, dan ABRI ditambah dengan pelaku pembantu baik berupa partai politik maupun oknum individu di sekitar pelaku utama.³

Adanya dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara resmi mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 maka Demokrasi Terpimpin dimulai. Dengan Dekrit tersebut posisi Soekarno sebagai Presiden RI menjadi sangat kuat. Terlebih lagi ia menempatkan para pendukungnya duduk di bangku parlemen pemerintahan Republik Indonesia. Imbasnya adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kemauan Soekarno dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pertentangan yang rumit. Di sisi lain, masuknya simpatisme PKI ke dalam bangku parlemen juga memberikan warna berbeda bagi roda pemerintahan Indonesia. Anggota PKI sangat

² Yaya Sumirat, “Gejolak Politik Di Akhir kekuasaan Presiden: kasus presiden Soekarno (1965-1967) dan Soeharto dalam pandangan surat kabar Kompas.” *Jurnal*, (Bandung: UPI, 2014), hlm. 18.

³ Rosihan Anwar, *Soekarno, PKI: segitiga kekuasaan sebelum prahara politik 1961-1965*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., 2006), hlm. 98.

mendukung pemerintahan sosialis sehingga relevan dengan konsep Nasakom yang dibentuk oleh Presiden Soekarno.

Kekuatan lain yang menunjang pemerintahan Indonesia adalah adanya peran ABRI yang menjaga keamanan dan pertahanan negara Republik Indonesia. Namun pada masa Soeharto ABRI dikembangkan sehingga memiliki fungsi ganda, yakni sebagai alat pertahanan dan keamanan negara serta alat menjalankan pemerintahan. Inilah salah satu pro-kontra pertama yang terjadi ketika akhir masa jabatan terakhir Presiden Soekarno.⁴

Kondisi Politik semakin memanas ketika adanya tragedi berdarah Gerakan 30 September 1965. Pada waktu itu, Indonesia mengalami krisis ekonomi, politik dan sosial yang sangat parah. Masyarakat mengalami kecemasan yang begitu tinggi. Demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai wilayah. Ditambah lagi adanya inflasi keuangan yang meningkat hingga 650%. Imbasnya adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Pada suasana krisis seperti itu, Presiden Soekarno tidak mampu mengatasinya. Inilah yang menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap Soekarno semakin merosot.⁵

Merosotnya kepercayaan masyarakat membuat Presiden Soekarno mengambil langkah praktis untuk menangani krisis politik

⁴Kerstin Beise, *Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G30S?*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 129.

⁵Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik, Jilid VI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hlm. 422.

dan ekonomi yang terjadi. Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Pemerintah kepada Jendral Soeharto untuk mengatasi krisis tersebut. Surat Perintah ini dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1965 dan lebih dikenal sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Efek dari darinya Supersemar ini adalah merosotnya kekuasaan Soekarno dalam bangku pemerintahan Republik Indonesia, khususnya pada masa Kabinet Ampera. Pada masa Kabinet Ampera, posisi Soekarno seakan-akan tidak memiliki arti.⁶ Kemerosotan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia terus terjadi. Puncaknya adalah ketika dilaksanakannya Sidang Umum MPRS pada tanggal 11 Oktober tahun 1966. Pada Sidang tersebut, Presiden Soekarno diminta pertanggungjawabannya selama memerintah negara Indonesia. Di sini, Soekarno malah memberikan pidato yang begitu panjang mengenai masalah-masalah yang telah terjadi. Pidato tersebut kemudian dikenal sebagai pidato *Nawaksara*. Pidato *Nawaksara* dianggap sangat mengecewakan peserta Sidang Umum tersebut, sebab pada prosesi Sidang, Presiden Soekarno dianggap tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap masalah yang terjadi, terutama tragedi berdarah Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI. Sidang tersebut disaksikan langsung oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera beserta para Menteri. Pada saat itu,

⁶ Susilo Suharto, *Kekuasaan Persiden dalam Priode Berlakunya UUD 1945*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 267

Presiden secara resmi langsung menyerahkan kekuasaan kepada Jendral Soeharto.⁷

Setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Soeharto memiliki kekuasaan penuh terhadap jalannya pemerintahan Indonesia. kedudukan Soeharto selanjutnya diperkokoh oleh Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Maret 1968. Tap tersebut juga secara praktis memperkokoh Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 yang mengangkat Jendral Soeharto sebagai pengemban tugas pemerintahan, khususnya dalam menangani kasus pembontakan yang dilakukan oleh golongan PKI.⁸

Dari hal tersebut, maka sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai peristiwa yang terjadi pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, dengan mengambil judul “Proses Transisi Kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru Dan Dampaknya Terhadap Perpolitikan di Indonesia (1966-1967)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi dan kondisi sebelum terjadinya transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru?

⁷ Poesponegoro, *Op. Cit.*, hlm : 425

⁸ Suharto, *Op. Cit.*, hlm: 8

2. Bagaimana proses terjadinya transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru?
3. Apa dampak transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru Terhadap Perpolitikan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan masalah di atas maka penelitian memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui situasi dan kondisi sebelum terjadinya transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru.
 - b. Untuk mengetahui proses terjadinya transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru.
 - c. Untuk mengetahui dampak transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru terhadap Perpolitikan di Indonesia.
2. Kegunaan
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan lebih detail mengenai Proses transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru dan dampaknya terhadap perpolitikan di Indonesia (1966-1967).
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih khasanah keilmuan sejarah untuk kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman secara utuh akan proses transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru dan dampaknya terhadap perpolitikan di Indonesia (1966-1967).

D. Ruang Lingkup

Dalam penulisan ini, peneliti hanya akan membahas mengenai proses transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru dan dampaknya terhadap perpolitikan di Indonesia (1966-1967).

Pembahasan meliputi:

1. Faktor menyebabkan terjadinya transisi
2. keadaan politik pada masa akhir kekuasaan Presiden Soekarno
3. Adanya dugaan keterlibatan pihak asing yang menyebabkan lengsernya Orde Lama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh Hayatul Na'imah dan diterbitkan oleh Jurnal Khazanah dengan Vol. 13, no. 1, tahun 2015. Artikel ini membahas mengenai proses transisi peralihan kekuasaan presiden dari masa ke masa. Persamaan artikel tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai proses transisi peralihan kekuasaan presiden Republik Indonesia. Adapun perbedaannya terletak

pada lingkup pembahasannya. Jika artikel tersebut membahas mengenai proses peralihan kekuasaan presiden Republik Indonesia secara menyeluruh, mulai dari Soekarno sampai kepada Susilo Bambang Yudoyono, maka penelitian ini hanya membahas mengenai proses peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.⁹

2. Transisi menuju demokrasi di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh Al Rafni dan diterbitkan oleh Jurnal Demokrasi dengan Vol. 1, no. 1 tahun 2002. Artikel ini membahas mengenai proses transisi kekuasaan dari Soeharto kepada B.J. Habibie. Persamaan penelitian ini dengan artikel tersebut adalah sama-sama membahas mengenai peralihan kekuasaan atau jabatan kepresidenan di Indonesia. Adapun perbedaannya terletak pada objek tokoh yang dibahas.¹⁰

3. Masalah kekuasaan presiden Republik Indonesia pada masa transisi pemerintahan (Studi tentang akhir masa jabatan presiden yang akan diganti).

Skripsi ini ditulis oleh Marzuki Sinambela, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2006. Skripsi ini membahas mengenai konflik yang

⁹ Hayatul Na'imah, "Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintas Sejarah Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal KHAZANAH*, Vol: 13 (1) 2015, hlm. 126.

¹⁰ Al-Rafni, "Transisi menuju demokrasi Indonesia", *Jurnal Demokrasi*, Vol. 1, (1) 2002, hlm. 12.

kerap terjadi pada akhir masa jabatan presiden di Indonesia. Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah terletak pada objek kajian peristiwa yang terjadi pada masa transisi kekuasaan presiden. Adapun perbedaannya adalah terletak pada studi temporal dan tokoh yang dikaji. Jika skripsi tersebut mengkaji akhir masa kekuasaanpresiden Indonesia secara menyeluruh, maka penelitian ini hanya membahas mengenai konflik atau peristiwa yang terjadi pada masa akhir kekuasaan Presiden Soekarno.¹¹

4. Gejala Politik di Akhir Kekuasaan Presiden: Kasus Presiden Soekarno (1965-1967) dan Soeharto dalam Pandangan Surat Kabar Kompas.

Skripsi ini ditulis oleh Yaya Sumirat, seorang mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI Bandung pada tahun 2014. Skripsi ini membahas mengenai beberapa konflik internal dalam perpolitikan di Indonesia pada akhir masa jabatan Soekarno. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah objek kajian yang akan dibahas. Jika skripsi tersebut berfokus pada konflik yang terjadi, maka penelitian ini membahas

¹¹ Marzuki Sinambela, “Masalah Kekuasaan Presiden Republik Indonesia pada Masa Transisi Pemerintah (Studi Tentang Akhir Masa Jabatan Presiden Yang Akan Diganti)”, *Artikel* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 17.

mengenai proses transisi dan revolusi pemerintahan yang dilakukan oleh Soeharto.¹²

5. Masa Akhir Kepemimpinan Soekarno

Skripsi ini ditulis oleh Aloyius Bram Widiyanto, seorang mahasiswa dari Universitas Santana Dharma, Yogyakarta pada tahun 2010. Skripsi ini membahas mengenai pemikiran Soekarno dan gejala perpolitikan yang terjadi pada masa akhir jabatannya. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penyebab dan proses berakhirnya Soekarno dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus kajian pembahasannya. Jika skripsi tersebut membahas mengenai proses lengser nya Soekarno, maka penelitian ini berfokus pada proses transisi dan naiknya Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia.¹³

F. Landasan Teori/Kerangka Konseptual

Dalam hal ini, kata “Proses” bisa dikatakan peristiwa sejarah lengsernya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru di mana pada saat itu era Orde Lama membuat kebijakan-kebijakan politiknya.

¹² Yaya Sumirat, “Gejolak Politik Di Akhir Kekuasaan Presiden: Kasus Presiden Soekarno (1965-1967) dan Soeharto dalam Pandangan Surat Kabar Kompas”, *Artikel*, (Jakarta: Universitas Indonesian, 2014),

¹³ Aloyius Bram Widiyanto, *Masa Akhir Kepemimpinan Soekarno*, Yogyakarta: Universitas Santana Dharma, 2010), hlm. 93.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transisi diartikan sebagai “Peralihan dari keadaan (tempat, tindakan, dan sebagainya).”¹⁴ Definisi serupa juga diberikan oleh Rahman yang mengatakan kekuasaan sebagai kemampuan pelaku dalam mengendalikan tingkah laku seseorang sesuai dengan apa yang pelaku hendaki.¹⁵ Di sisi lain kekuasaan juga bisa diartikan sebagai pengawasan atau pengaruh atas pengambilan sebuah keputusan yang mempunyai kewenangan (*authoritative*).

Kekuasaan wajib ada dalam suatu penyelenggaraan kehidupan politik. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.¹⁶ Sebab dengan adanya kekuasaan, tatanan kehidupan masyarakat lebih terkontrol dan terkendali. Selain itu, politik juga bisa menjadi sebuah media dalam perwujudan keadilan dan kebijaksanaan yang mengikat seluruh masyarakat di suatu negara.¹⁷ Pada masa Demokrasi Terpimpin presiden Soekarno memilih para menteri yang sejalan dengannya untuk membentuk kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan.

¹⁴ Tim Penulis Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal 568.

¹⁵ Rahman Zaunuddin, *Kekuasaan dan Negara: pemikiran Politik Ibnu Khaldun* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 103.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 17.

¹⁷ Sudjiono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 109.

Orde Lama adalah periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Presiden Soekarno memerintahkan menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Dan pada masa itu juga Pemerintahan Indonesia mengalami peralihan. Indonesia pernah menetapkan sistem pemerintahan sistem presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem demokrasi terpimpin, demokrasi liberal.¹⁸

Orde Baru tahun 1967, diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tahun 1966 dengan ketetapan MPRS No. IX/MPRS/11966, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1966. Keluarnya ketetapan MPRS tersebut akibat terjadinya peristiwa G30S pada tahun 1965 yaitu aksi PKI yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD. Menurut A. Mukti Ali lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang merupakan salah satu tonggak dalam proses lahirnya masa Orde Baru yang didahului suatu peristiwa pengkhianatan terhadap bangsa dan negara oleh Gestapu 30 S/ PKI, yang menghendaki hilangnya Pancasila dari persada Indonesia terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa hendak digantikan dengan ajaran anti Tuhan. Dalam perkembangan

¹⁸ Salsabilah Sovia Zahran, "Hukum Tatanegara Tentang Pelaksana UUD 1945 (Orde Baru) Dalam Perspektif Ketatanegaraan," *Skripsi* (Padang: Universitas Ekasakti, 2019), hlm. 17.

perjuangan bangsa dan negara Indonesia, Supersemar membuka era baru dalam sejarah Indonesia.¹⁹

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan-benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan.²⁰ Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau pelanggaran. Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*. Makna *impact* dalam Bahasa Inggris ialah tabrakan badan; benturan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan; pengaruh kuat yang mendapatkan akibat (baik negatif maupun positif). Seperti halnya dampak yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno yang membuat kebijakan-kebijakan perpolitikan seperti kebijakan demokrasi terpimpin.

Dalam pembagiannya, setidaknya ada dua dampak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dapat diartikan sebagai hal baik yang harus dicapai dalam suatu upaya. Bagi seseorang yang berpikir positif, mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk, maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jika pengertian dampak positif adalah keinginan untuk mewujudkan, meyakinkan, mempengaruhi,

¹⁹ Leidin Girsang, *Indonesia Sejak Supersemar*, (Jakarta: Yayasan Laita, 1973), hlm. 223.

²⁰ Tim Penulis Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal 234.

atau mendukung keinginan yang baik. Adapun dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.²¹

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian tentunya ada metode ilmiah yang digunakan. Metode yang dimaksud adalah metode sejarah yang mempunyai empat tahapan, yakni heuristik, verifikasi, intepretasi, dan historiografi.

Untuk penelitian Proses Transisi Kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru dan dampaknya terhadap perpolitikan di Indonesia, maka tahapan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.²²

1. Heuristik

Tahapan Heuristik yang dapat diartikan sebagai penelusuran jejak dari pada sumber-sumber, ini menjadi penting karena sejarah merupakan sejarah yang sudah terjadi atau lalu.²³ Setidaknya ada dua kategori sumber sejarah yakni

²¹ <https://repostory.uin-suska.ac.id/dampakpernikahandinididesamargamuliakecamatanrambasamokabupatenrakanhulu>. Diakses tanggal 17 Maret 2023.

²² Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Hlm. 35

²³ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah Metode Dan Praktik* (Gresik: JSI, 2022). hlm. 47.

sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer diartikan sebagai sumber utama sedangkan sumber sekunder (penunjang), dalam penelitian ini berasal dari buku, dokumen, dan karya ilmiah yang terkait dengan Proses Transisi Kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru dan dampaknya terhadap perpolitikan di Indonesia (1966-1967). Dalam tahapan ini, maka setidaknya penulis menggunakan teknik sebagai berikut.

a. Penelitian pustaka (*Research Library*)

Metode studi pustaka merupakan metode penelitian yang menggunakan cara pengambilan sumber buku sebagai bahan penulisan penelitian. Bacaan tersebut bisa berupa naskah, buku-buku, artikel dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

b. Metode observasi virtual

Pada metode ini peneliti langsung mencari informasi di dunia internet dengan menggunakan teknologi seperti gawai atau laptop. Metode observasi virtual ini dilakukan dengan menelusuri beberapa video ataupun gambar yang terdapat pada internet.

2. Tahapan verifikasi

Tahap verifikasi merupakan tahapan uji kelayakan data yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti melakukan uji kredibilitas dengan cara membandingkan beragam sumber yang

terkumpul untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif.

3. Tahap Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan penyimpulan. Dalam hal ini seorang peneliti akan menafsirkan sumber data yang relevan dengan pembahasan yang sedang dikaji dengan melakukan cara pendekatan sejarah.

Pada tahap ini pula akan diadakannya penafsiran dengan cara menganalisa data dan menyatukan dengan fakta-fakta yang kemudian diinterpretasikan.

4. Tahap Historiografi

Pada tahapan ini peneliti menyusun dan menuliskan hasil dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diperoleh. Penulisan ini dirancang dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri atas empat bab. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dankegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang sejarah pemerintahan orde lama dengan sub bab yang berisi dari era demokrasi liberal, dan era demokrasi terpimpin.

Bab III, berisi tentang peristiwa yang menyebabkan runtuhnya orde lama. Dalam bab ini kemudian akan diuraikan lagi dalam sub bab yakni, tentang peristiwa G30S PKI, Tritura, Supersemar, dan TAP MPRS No. IV Tahun 1966.

Bab IV, berisi dampak lahirnya Orde Baru dalam bab ini akan diuraikan tentang kebijakan-kebijakan politik orde baru dan perbandingannya dengan Orde Lama.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian dan saran dari penelitian ini.

